

**BURUH DAN KETIDAKADILAN:
LAHAN SUBUR BAGI PERLUASAN MARXISME
SUATU KAJIAN HISTORIS TENTANG BURUH DI SEMARANG
PADA AWAL ABAD KE-20**

Dewi Yuliaty

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Abstract

This study aims to analyse many factors which are supposed to form the base of the spread of Marxism, especially in Semarang in the second decade of the 20th century. This article explains that indigineous workers in Semarang in the first quarter of the 20th century suffered economic injustice, which become the important access for the propagandists of Marxism to inflame the spirit of anticapitalism and anticolonialism.

Keywords: Semarang, buruh, marxisme, komunisme, kapitalisme.

1. Pengantar

Pada pertengahan abad ke-19, terjadi perubahan pemikiran dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial mulai mengurangi campur tangan dalam produksi dan mulai menyediakan berbagai fasilitas untuk mendorong inisiatif swasta. Liberalisme diformalkan dalam undang-undang agraria 1870. Pemberlakuan undang-undang ini menandai berakhirnya sistem Tanam Paksa secara formal dan terjadinya perubahan dari *state capitalism* ke *private capitalism*. Liberalisme telah memberikan peluang dan sarana kepada pihak swasta untuk membuka usaha-usaha industrial, termasuk di Semarang.

Sejalan dengan perkembangan industri-industri, berkembang pula kelompok sosial baru yaitu kelas buruh. Secara harafiah, buruh adalah orang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan imbalan berupa upah atau gaji.. Buruh dapat dibedakan dalam 2 kategori yaitu: (1) buruh profesional – biasa disebut buruh kerah putih – menggunakan otak dalam bekerja; (2) buruh kasar – biasa disebut buruh kerah biru – menggunakan tenaga otot dalam bekerja . Pada umumnya, kata buruh digunakan untuk merujuk kepada tenaga kerja dalam bidang industri barang atau jasa (<http://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>).

Kota Semarang, yang sejak pertengahan abad ke-19 telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri modern dan masyarakat buruh di Jawa (Dewi Yuliaty, 2009), adalah tempat pertama bagi penyebaran ideologi Marxis di Indonesia. Di satu sisi, pembahasan difokuskan pada situasi sosial-ekonomi yang mengkondisikan terciptanya kemiskinan masyarakat buruh bumiputera di Kota Semarang. Kondisi sosial-ekonomi buruh yang menjadi fokus kajian adalah terutama perekrutan buruh, upah, posisi pekerjaan, kondisi pemukiman dan kesehatan buruh. Di sisi lain, pembahasan juga difokuskan pada cara-cara dan proses perluasan Marxisme demi membangkitkan kesadaran kelas buruh untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme.

2. Perekrutan , Posisi Pekerjaan, dan Upah Buruh

2.1. Perekrutan Buruh

Industrialisasi di di Semarang, yang telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-19, tidak dapat terhindar dari masalah perekrutan tenaga kerja. Suatu industri modern di Semarang yang kemudian menjadi faktor akselerasi perekrutan tenaga kerja bagi industri-industri di kota ini adalah industri dalam bidang jasa transportasi kereta api yang mulai beroperasi sejak paroh ke-2 abad ke-19. Jaringan jalan kereta api yang berpusat di Semarang dan menuju ke daerah-daerah pedalaman serta kota-kota lainnya telah menciptakan pasar tenaga kerja bagi kota itu. Dengan menggunakan sarana angkutan kereta api, banyak pekerja dari daerah pedalaman datang ke Kota Semarang untuk bekerja di pelabuhan, di pergudangan, di pabrik-pabrik, dan sebagai pedagang keliling (John Ingleson, 1986:20) Khususnya untuk keresidenan Semarang, pembangunan jalan kereta api ini juga mendorong pembukaan jalan-jalan setapak dan jalan kereta kuda baru di daerah pedalaman yang menghubungkan desa-desa dengan tempat pemberhentian kereta api (Djoko Suryo, 1989: 128-132). Pembangunan jalan-jalan baru itu berarti semakin memudahkan mobilisasi kaum pekerja dari desa ke kota. Peristiwa mobilisasi para pekerja dari pedalaman Semarang dengan angkutan kereta api pada awal abad ke-20 sulit dibuktikan secara kuantitatif. Namun demikian, laporan *Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij* tentang kepadatan penumpang kereta api dapat dijadikan indikasi bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pendatang di kota Semarang dari tahun ke tahun sebagai berikut.

Tabel 1. Angka Kepadatan Penumpang Kereta Api Semarang - Cirebon tahun 1912, 1913, 1914 (Kepadatan Penumpang = jumlah penumpang x jumlah kilometer yang ditempuh dibagi jumlah hari x jumlah kilometer)

Jalur	1912	1913	1914
Semarang – Kaliwungu	1.287	1.445	1.502
Kaliwungu – Kalibodri	-	-	605
Kalibodri – Pekalongan	520	567	638
Pekalongan – Tegal	749	881	937
Tegal – Brebes	1.068	1.333	1.425
Brebes – Losari	746	879	1.000
Losari – Mundu	866	1.052	1.113
Mundu – Cirebon	1.134	1.368	1.433
Cirebon – Kadipaten	581	643	642
Tegal – Balapulang	447	556	619

Sumber: *Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij Verslag Over Het Jaar 1914*, hlm. 12-13.

Angka-angka kepadatan penumpang kereta api tersebut di atas menunjukkan bahwa jalur Semarang-Kaliwungu memiliki kepadatan tertinggi, kemudian jalur terpadat kedua adalah Mundu-Cirebon. Dengan demikian, angka kepadatan penumpang itu juga dapat menjadi indikasi bahwa arus mobilitas orang di sekitar kota-kota besar lebih tinggi daripada kota-kota yang lebih kecil.

Indikasi tentang peningkatan jumlah penumpang juga dapat diketahui dari laporan *Semarang-Joana Stoomtram-Maatschappij* tentang hasil bruto dari muatan penumpang dan bagasi sejak tahun 1915 sampai dengan tahun 1919 sebagai berikut. Untuk jalur dalam Kota Semarang pada tahun 1915 diperoleh hasil bruto sebesar f. 147.394,35 ; tahun 1916: f.148.457,82. ; tahun 1917: f. 161.381,92 ; tahun 1918: f.

180.111,59 ; tahun 1919: 197.961,78. Untuk jalur Semarang-Juana pada tahun 1915 diperoleh hasil bruto sebesar f. 424.641,14 ; tahun 1916: f. 462.483,75 ; tahun 1917: f. 508.175,38 ; tahun 1918: f. 561.358,96 ; tahun 1919: f. 639.820,50 (*Semarang-Joana Stoomtram-Maatschappij Verslag over Het Jaar 1919*, lampiran No. 13). Menurut laporan Gemeente Semarang tahun 1917, kebanyakan para kuli (pekerja) di Semarang berasal dari luar kota itu. Setiap hari kereta api S.J.S., S.C.S., dan N.I.S. mengangkut ribuan orang pribumi dari luar kota. Selain dengan kereta api, mereka juga datang ke Semarang dengan jalan kaki atau naik gerobag, terutama mereka yang berasal dari Gubug (*Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Semarang Over 1917*: 331). Peningkatan kepadatan penumpang kereta api Semarang-Juana dapat disimak pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Angka Kepadatan Penumpang Kereta Api Semarang – Juana Tahun 1917, 1918, 1919

Jalur	Tahun 1917	Tahun 1918	Tahun 1919
Jalur dalam Kota Semarang:			
a. Stasiun sentral – Jomblang	6.882	7.027	7.314
b. Stasiun sentral – Banjir Kanal	4.464	4.214	4.075
Semarang-Demak	2.515	2.761	2.998
Demak – Kudus	1.132	1.204	1.329
Kudus – Juana	894	807	999
Juana-Rembang	564	585	942
Lasem-Pamotan	167	176	332
Pamotan-Jatirogo	-	-	248
Kudus-Mayong	768	754	823
Mayong-Pecangaan	370	394	451
Mayong-Welahan	280	312	360
Juana – Tayu	351	367	436
Demak-Purwodadi	568	563	645
Purwodadi-Wirosari	378	358	404
Wirosari-Blora	396	378	450
Purwodadi-Gundih	376	344	352
Wirosari-Kradenan	254	205	249
Rembang-Blora	535	541	591
Blora-Cepu	648	664	695

Sumber: *Semarang-Joana Stoomtram-Maatschappij Verslag Over Het Jaar 1919*, hlm. 2

Angka-angka kepadatan penumpang kereta api Semarang-Juana tersebut juga menunjukkan bahwa jalur yang berhubungan langsung dengan Semarang memiliki angka kepadatan penumpang tertinggi. Kenaikan jumlah penumpang kereta api dengan tujuan Semarang dapat diperhatikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Penumpang Bumiputera Kereta Api N.I.S., S.J.S., S.C.S,ke Semarang Tahun 1924-1928

Tahun	N.I.S.	S.J.S.	S.C.S.
1924	229.337	611.290	-
1925	228.199	594.815	-
1926	215.689	616.855	200.754
1927	245.768	689.468	225.728
1928	380.029	706.767	239.453

Sumber: Verslag Van De Toestand Der Gemeente Semarang Over 1928, hlm. 187.

Dalam tabel di atas dapat diperhatikan bahwa jumlah penumpang yang datang ke Semarang dengan kereta api Semarang-Juana jauh lebih tinggi daripada jumlah penumpang dengan N.I.S. dan S.C.S. Berdasarkan pada sumber-sumber di atas, dapat dikemukakan dugaan sementara bahwa daerah-daerah di sepanjang jalur kereta api Semarang-Juana kurang subur jika dibandingkan dengan daerah di sepanjang jalur Semarang-*vorstenlanden* (N.I.S.) dan jalur Semarang-Cirebon (S.C.S.), sehingga terjadi migrasi yang cukup tinggi dari daerah-daerah itu ke Semarang untuk mencari penghidupan di kota ini.

Perekrutan buruh industri dari daerah-daerah di sekitar Semarang tidak terlepas dari peranan mandor (pengawas pekerjaan). Biasanya ia tetap menjaga hubungan baik dengan desa atau tempat asalnya. Pada saat diperlukan, ia dapat mengajak orang-orang desanya untuk bekerja pada perusahaan tempat ia bekerja. Para pengusaha Eropa menyukai sistem perekrutan ini, karena cara itu dapat menyediakan tenaga kerja yang terpercaya di bawah pengawasan seorang mandor. Selain sebagai pengawas, mandor juga menjadi penghubung dalam komunikasi antara para pengusaha Eropa dan buruh bumiputera. Pada umumnya para pengusaha Eropa hanya dapat berbicara dengan bahasa Melayu “pasar”, dan sebaliknya, kaum buruh hanya dapat berbicara dengan bahasa daerah masing-masing. Mandor adalah pekerja kunci bagi perusahaan-perusahaan milik orang Eropa, baik swasta maupun pemerintah, karena selain bertugas untuk menyampaikan instruksi dari atasan kepada para buruh, mandor juga menjadi penyampai aspirasi buruh kepada pengusaha Eropa. Tugas mandor yang lain adalah mengatur perumahan buruh, menentukan pengangkatan dan pemecatan buruh, menentukan hari libur buruh, mengalokasikan pekerjaan buruh, dan mengawasi kehidupan kaum buruh (John Ingleson, 1986: 23). Karena tugas-tugas itu, mandor mendapat upah yang lebih tinggi daripada upah buruh lainnya.

Pada umumnya dalam setiap perusahaan terdapat tiga kategori buruh yaitu kuli (buruh tidak ahli), buruh ahli, dan mandor. Kategori buruh dan tingkat upah harian buruh dapat dilihat antara lain pada pabrik gas di Semarang sebagai berikut. Upah kuli bumiputera: f. 0,45; upah buruh ahli Timur Asing: 1,80; upah buruh ahli bumiputera: 1,375; upah mandor Timur Asing: f. 2; upah mandor bumiputera: f. 1,75 (*Koloniaal Verslag van 1915*).

2.2. Pendidikan dan Upah Buruh Bumiputera

Mengingat banyak pekerja berasal dari daerah pedesaan yang kurang berpendidikan, masalah pendidikan atau pelatihan kerja menjadi bahan pemikiran penting bagi *gemeente* Semarang. Sebagian besar kaum migran itu hanya berpendidikan sekolah desa, sehingga *gemeente* Semarang mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengadakan perluasan pendidikan di Kota Semarang, terutama sekolah-sekolah pendidikan guru untuk sekolah rakyat (*Normaalscholen*). Dari lembaga pendidikan ini *Gemeente* Semarang dapat memperoleh tenaga-tenaga guru yang dapat memberikan

pelajaran dengan bahasa daerah untuk sekolah rakyat (*Inlandsche Scholen der 2de klasse*). Jumlah guru untuk sekolah rakyat bumiputera itu memang sangat terbatas. Sebagai contoh, di sekolah rakyat di Kampung Rejosari yang memiliki 4 kelas dengan jumlah murid 134 orang, hanya terdapat 3 orang guru (*Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Semarang Over 1917*: 331-332). Pada tahun 1917 di Semarang hanya terdapat beberapa lembaga pendidikan guru yaitu: *Normaalschool* (Sekolah Guru untuk Sekolah Rakyat) dengan jumlah murid 25 orang, *Cursus Opleiding van Onderwijzeressen der Zuster Fransiscanessen* (Kursus Guru Wanita) dengan jumlah murid 34 orang, dan *Normaalcursus voor Inlandsche Onderwijzers* (Kursus Guru Pria Bumiputera) dengan jumlah murid 38 orang. Lembaga-lembaga pendidikan ini tidak mendapat subsidi dari pemerintah pusat (*Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Semarang Over 1917*: 374).

Bagi orang yang ingin bekerja dalam bidang administrasi seperti juru tulis, kasir, dan pengawas, persyaratan yang harus mereka miliki adalah kemampuan berbahasa Belanda. Guna memenuhi persyaratan itu, seseorang harus berasal dari kalangan yang berstatus priyayi atau memiliki banyak uang untuk memasuki sekolah-sekolah Belanda. Orang-orang bumiputera di Jawa dan Madura yang dapat memasuki sekolah-sekolah Belanda pada tahun 1930 hanya berjumlah 43.512 atau 0,13% dari jumlah penduduk di wilayah itu (John Ingleson, 1986: 23). Salah satu gambaran tentang sedikitnya jumlah orang bumiputera yang dapat mengikuti pendidikan Barat dapat disimak pada laporan *Semarangse Ambachtsschool School Voor Opzichters en Machinisten* (Sekolah Pertukangan Semarang – Sekolah untuk Pengawas dan Masinis) yang melaporkan jumlah murid pada sekolah tersebut sebagai berikut.

Tabel 3. Jumlah murid Sekolah Pertukangan Semarang pada tahun 1914

Tahun Pelajaran	Jumlah Murid Bagian Ilmu Mekanika			Jumlah Murid Bagian Ilmu Bangun		
	Eropa	Cina	Bumi- Putera	Eropa	Cina	Bumi- Putera
I	25	3	1	17	3	6
II	15	-	1	19	-	8
III	9	-	-	5	-	2

Sumber: *Semarangse Ambachtsschool School Voor Opzichters en Machinisten Varslag Over Het Jaar 1914* (Semarang-Soerabaja-Den Haag: Boekerij en Drukkerij G.C.T. Van Dorp), 1915, hlm. 25-27.

Pada tanggal 15 Desember 1917 *Semarangse Ambachtsschool* berganti nama *Technische School Semarang* (Sekolah Teknik Semarang). Dalam laporan *gemeente* Semarang tahun 1919 dilaporkan jumlah murid sekolah tersebut dari tahun ajaran 1916 sampai dengan tahun ajaran 1918 sebagai berikut.

Tabel 4. Jumlah murid *Technische School Semarang* pada tahun ajaran 1916 - 1918

Tahun Pelajaran	Jumlah Murid Bagian Ilmu Mekanika			Jumlah Murid Bagian Ilmu Bangun		
	Eropa	Cina	Bumiputera	Eropa	Cina	Bumiputera
1916-1917	56	5	5	43	5	23
1917-1918	55	8	5	36	6	24
1918-1919	49	8	6	34	19	3

Sumber: *Verslag Van De Toestand Der Gemeente Semarang Over 1919* (Semarang-Soerabaja: G.C.T. Van Dorp), tt., hlm. 93.

Karena sebagian besar rakyat bumiputera hanya berpendidikan rendah, mereka pun menempati posisi pekerjaan rendahan dengan upah yang rendah pula dalam sistem birokrasi kolonial. Sebagai bukti, berikut ini ditampilkan daftar nama pekerja, posisi pekerjaan, tahun, dan gaji bulanan pada perusahaan air bersih yang dimuat dalam laporan *gemeente* Semarang (*Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Semarang Over 1915*: 18).

Tabel 5. Nama, Posisi Pekerjaan, dan Gaji Pegawai Perusahaan Air Bersih Gemeente Semarang Tahun 1914

NAMA	POSISI PEKERJAAN	TAHUN PENGANGKATAN	GAJI
E.J. Minkman	Direktur	1913	f. 300
J. Vallentgoed	Kepala Pengawas	1913	f. 350
J.F.M.J. Van Rijn	Pemegang Pembukuan	1915	f. 250
H.M. Absen	Pengawas	1914	f. 150
Th. E. Kopetsky	Pengawas	1914	f. 150
J.C. Klerks	Pengawas	1914	f. 120
D.G. Bigler	Juru tulis Kelas I	1916	f. 120
S.N. Akoewan	Kasir	1915	f. 75
M. Tondokoesoemo	Juru Tulis Kelas I	1915	f. 60
M. Daroesman	Juru Tulis Kelas II	1914	f. 40
Wisnoe	idem	1915	f. 35
M. Arismoenandar	idem	1916	f. 30
M. Soedigio	idem	1916	f. 30
R. Mohamad Saleh	Pengedar rekening	1915	f. 50
R. Tirtosoegondo	Pencatat meter	1914	f. 35
R. Alibasah	idem	1914	f. 35
R. Koesoemodirdjo	idem	1914	f. 30
R. Wirjoesastro	idem	1914	f. 30
Amat Oesoel	Mandor	1911	f. 30
Idi	Sopir	1914	f. 30

Daftar di atas menunjukkan bahwa orang-orang Eropa menempati posisi pekerjaan yang lebih tinggi dan memperoleh gaji yang lebih besar daripada orang bumiputera, meskipun mereka dalam posisi pekerjaan yang sama (periksa gaji D.G. Bigler dan M. Tondokoesoemo sebagai juru tulis kelas I). Dalam sistem birokrasi dan produksi kolonial juga tampak secara jelas penempatan posisi pekerja atas dasar ras. Kondisi ini dapat dilihat pada laporan Semarang-Joana Stoomtram-Maatschappij dan Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij berikut ini.

Tabel 6. Posisi dan Jumlah Pekerja pada S.J.S. dan S.C.S. Tahun 1934-1938

Posisi Pekerjaan	1934	1935	1936	1937	1938
Ambtenaar Eropa	126	110	105	105	105
Ambtenaar Bumiputera	43	41	43	42	41
PegawaiRendah Eropa	-	-	-	1	1
PegawaiRendah Bumiputera	1.351	1.400	1.391	1.423	1.457

Sumber: *Semarang-Joana Stoomtram-Maatschappij Verslag Over Het Jaar 1938*, hlm. 6.

Angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah *ambtenaar* bumiputera pada perusahaan kereta api tersebut kurang dari 50 % jumlah *ambtenaar* Eropa, dan orang bumiputera yang berjumlah lebih banyak daripada jumlah orang Eropa hanya menempati posisi pekerjaan sebagai pegawai rendahan atau buruh yang menerima upah.¹

Stratifikasi sosial ini pun tampak secara jelas dalam sektor pelayanan umum. Dalam angkutan kereta api, contohnya, tiket dan penggunaan gerbong dibedakan atas dasar ras dan kemampuan ekonomi penumpang: kelas I untuk golongan Eropa dan para pejabat, kelas II untuk golongan lainnya yang mampu, dan kelas “inlanders” (kelas untuk rakyat pribumi) (*Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij Verslag Over Het Jaar 1919*, lampiran No. 14).

Dari pembahasan di atas dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa sejalan dengan industrialisasi di Semarang, orang-orang bumiputera direkrut secara *massive* untuk menempati posisi pekerjaan rendahan dengan implikasi upah yang rendah pula. Stratifikasi sosial yang berdasar pada ras (Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera) juga berlaku dalam stratifikasi posisi pekerjaan dan tingkat gaji serta upah. Faktor-faktor ini mempunyai implikasi dengan faktor sosial yang lain, yaitu kondisi pemukiman serta kesehatan rakyat bumiputera yang berpenghasilan rendah di Kota Semarang.

3. Masalah Pemukiman dan Kesehatan Buruh

Pada perempat pertama abad ke-20 Semarang telah dikategorikan sebagai kota yang berkembang pesat. Kategori ini didasarkan pada ukuran jumlah penduduknya yang melebihi 100.000 orang pada tahun 1930 (W.F. Wertheim (ed.), 1958: 11). Perkembangan Kota Semarang ini sejalan dengan perkembangan kapitalisme agraria yang dicanangkan mulai tahun 1870 dengan segala sarana pendukungnya seperti firma dagang, bank, dan industri. Perkembangan Kota Semarang menarik orang-orang Eropa untuk membeli tanah-tanah di sepanjang jalan besar (tanah domein pemerintah), yang masih berupa perkampungan penduduk bumiputera. Penduduk yang tinggal di atas tanah-tanah kampung tersebut terpaksa pindah ke kampung-kampung lain, sehingga terjadi konsentrasi penduduk bumiputera di tempat ini (W.F. Wertheim (ed.), 1958: vii).

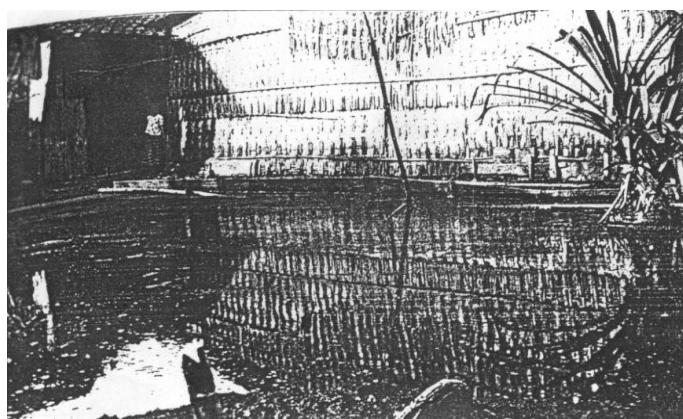
Pada akhir abad ke-19, banyak pengusaha Eropa datang ke Semarang untuk memanfaatkan kemudahan dalam menyewa tanah pemerintah dan tanah penduduk setempat untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Tanah perkampungan penduduk bumiputera yang disewa pertama kali oleh orang Eropa adalah tanah di kawasan Bojong. Kemudian di kawasan itu berdiri banyak vila milik golongan elit Eropa yang bergaya neoklasik dengan taman-taman yang indah. Di antara vila-vila itu juga dibangun rumah-rumah pegawai rendah Eropa, terutama golongan Indo. Penduduk bumiputera menyingkir ke kampung Bulu, Pandean, Ambengan, dan Karangsari. Kampung-kampung ini merupakan perkampungan yang luas dan padat, terutama oleh arus migran dari luar kota Semarang (B. Brommer, dkk. 1995: 18). Kota menjadi alternatif untuk memperoleh pekerjaan bagi kaum migran, karena di desa-desa semakin banyak tanah penduduk yang disewa oleh pengusaha perkebunan (Ruth T. McVey, 1965: 8).

¹ Upah adalah harga tenaga kerja buruh atau pegawai rendahan, yang jumlahnya sesuai dengan jumlah hari kerja. Sistem penghargaan tenaga kerja dalam bentuk upah di Jawa dimulai pada saat berlangsungnya sistem tanam paksa. Ketika itu, rakyat yang melakukan pekerjaan di pabrik-pabrik gula milik swasta dan mengangkut hasil perkebunan ke pabrik-pabrik dengan gerobak, mendapat bayaran berupa uang. Dengan cara ini, sistem tanam paksa mendorong munculnya pekerja upahan dalam masyarakat agraris. Periksa: W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 190.

Pada umumnya orang Eropa memiliki rumah yang bagus di tepi jalan besar dengan halaman luas yang berpagar, dan berfasilitas gas serta listrik. Sebaliknya, orang bumiputera tinggal di kampung-kampung yang berawa-rawa atau becek, dengan jalan yang sempit dan kotor, yang menjadi sumber debu pada musim kemarau dan menjadi rawa pada musim penghujan. Rumah mereka terbuat dari bambu, dengan sanitasi yang masih primitif, sumur umum, dan tanpa listrik (John Ingleson, 1986: 42).

Pada tahun 1913, H.F. Tillema, seorang apoteker dan anggota *gemeenraad* (dewan kota) Semarang, mengadakan penelitian terhadap kondisi kesehatan dan fisik kampung-kampung di Kota Semarang. Penelitian itu dilakukannya dengan membuat foto rumah-rumah penduduk dan lingkungannya. Foto-foto itu merupakan bukti bahwa perumahan penduduk bumiputera di kampung-kampung tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Rumah mereka dibuat dari bambu dengan lantai tanah, tanpa ventilasi, tanpa penerangan, letaknya tidak teratur, WC terletak di atas saluran kecil serta dangkal, dan sumur berada di dekatnya. Dalam hasil penelitiannya, *Van Wonen en Bewonen, Van Bouwen, Huis en Erf*, Tillema mengemukakan suatu ungkapan yang menarik untuk disimak : “Jika orang mengamati kondisi itu, dan jika orang ingin memperbaiki kondisi hampir 100.000 jiwa itu, orang harus berharap akan datangnya Hercules kedua untuk dapat membersihkan dan memperbaiki *augiasstal* ini (H.F. Tillema, 1913: 54).²

Gambar 1. Salah satu lingkungan di suatu kampung dalam Kota Semarang yang digambarkan seperti kandang sapi raja Augias yang tak pernah dibersihkan selama 30 tahun.



Sumber: H.F. Tillema, *Van Wonen en Bewonen, Huis en Erf* (Tjandi – Semarang, 1913), foto No. 17. Sumber tidak menyebut nama kampung.

Menurut Tillema, penduduk kampung meminum air sumur yang terletak di dekat WC atau saluran-saluran pembuangan kotoran. Kepadatan penduduk mencapai 400 sampai 1.000 orang per hektar. Kondisi demikian itu sangat memudahkan berjangkitnya penyakit cholera dan penularannya (H.F. Tillema, 1913: 33, 45, 49). Berdasarkan pada hasil penelitiannya itu, Tillema membuat perencanaan perbaikan rumah dan kampung-kampung penduduk bumiputera. Halaman rumah-rumah

² *Augiasstal* adalah kandang 3000 sapi milik raja Augias, yang tidak pernah dibersihkan selama 30 tahun. Hercules dapat membersihkannya selama satu hari.

penduduk harus menghadap ke jalan untuk memudahkan lalu lintas dan masuknya udara segar. Jalan-jalan besar harus dibangun searah dengan arah angin. Jarak antara satu rumah dan rumah lainnya direncanakan sekitar 500 – 1.000 meter untuk menghindari penularan penyakit malaria (D.J.A. Westerveld, 1914: 101). Namun demikian, rencana ini tak kunjung terealisasi sampai akhir pemerintahan kolonial Belanda, karena anggaran *gemente* dan pemerintah pusat selalu tidak mencukupi untuk itu. Pada masa krisis 1930-an keadaan perkampungan semakin memburuk. Pada tahun 1935 Abikoesno menulis tentang penurunan kondisi perekonomian rakyat ketika itu, dan kampung-kampung pun semakin terbenam dalam rawa-rawa (James L. Cobban, 1988: 289).

Suatu penelitian terhadap perumahan penduduk bumiputera di Semarang pada tahun 1914 menunjukkan bahwa sekurangnya 80,4% jumlah rumah penduduk bumiputera di kampung-kampung di Semarang adalah milik penghuni rumah, tetapi hanya 29,2 % penduduk memiliki tanah tempat rumah mereka dibangun, dan penduduk lainnya menyewa tanah (D.J.A. Westerveld, 1914: 345). Perkampungan di Semarang pada saat itu dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu: kampung di atas tanah milik *gemeente*, kampung baru di pinggiran Semarang, kampung di atas tanah milik swasta (James L. Cobban, 1988: 281). Pada umumnya para buruh ahli, yang menerima upah lebih tinggi, bertempat tinggal di kampung-kampung yang bagus di atas tanah milik swasta, bebas banjir, dan dekat dengan fasilitas kota. Sebaliknya, kaum buruh tidak ahli atau kuli, sesuai dengan tingkat upahnya, menghuni kampung-kampung dengan kondisi yang buruk di daerah pinggiran (D.J.A. Westerveld, 1914: 356).

Bagi kaum buruh yang berasal dari luar kota, di Semarang tersedia banyak penginapan dengan harga murah atau terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Penginapan bagi kaum migran ini dikenal dengan “pondok boro”. Pada tahun 1917 gemeente Semarang telah mengeluarkan ijin bagi pembangunan 62 “pondok boro” (*Verslag Van Der Toestand Der Gemeente Semarang Over 1917*: 254).³ Hal ini merupakan petunjuk bahwa pada waktu itu jumlah kaum buruh pendatang semakin meningkat, sehingga jumlah “pondok boro” di kota itu harus diperbanyak.

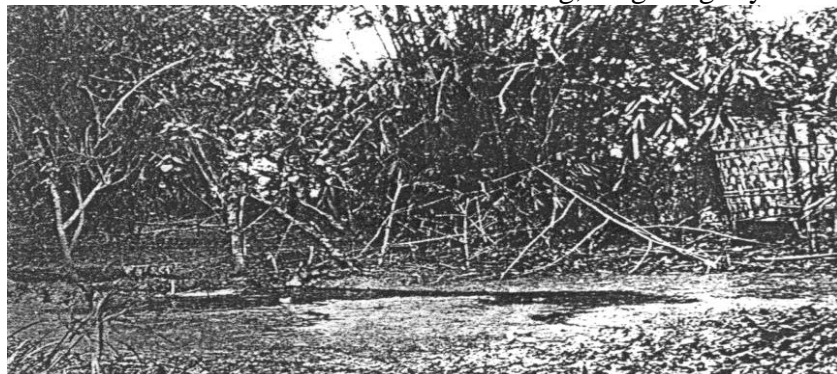
Buruknya kondisi perumahan dan perkampungan rakyat bumiputera, khususnya perkampungan rakyat yang berpenghasilan sangat rendah, telah mengakibatkan meluasnya wabah pes di kampung-kampung dalam Kota Semarang pada dekade kedua abad ke-20. *Gemeente* Semarang melaporkan bahwa sejak bulan Oktober 1916 sampai dengan Desember 1917 terdapat 31 orang yang terjangkit penyakit pes. Kampung-kampung bumiputera yang dinyatakan terserang penyakit pes yaitu: Karangturi, Lemahgempal, Bugangan, Gambiran, Bojongpejambon,

³ “Pondok Boro” adalah tempat penginapan bagi para pendatang di kota Semarang yang berasal dari kalangan bawah. Tempat penginapan ini dapat menampung sampai ratusan orang dengan harga yang murah. Sampai dengan tahun 1990-an di Semarang masih terdapat “pondok boro”, warisan dari jaman kolonial, yang terletak di Kampung Sumeneban, di dekat Pasar Johar. Pondok ini dapat disewa secara harian dengan harga Rp. 200 per hari. Periksa: Amen Budiman, “Pondok Boro di Sumeneban Tempat Bermalam bagi Kaum Pendatang” dalam *Suara Merdeka*, 6 November 1991.

Kembang Sari, Randusari, Widoharjo, Lamper Kidul, Genuk, Bandarharjo, Rejosari, Barusari, Bulustalan, Pederesan, Bulu Lor, Pendrian Kidul, dan Kentangan (*Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Semarang Over 1917*: 275). Selain itu terdapat 76 korban pes yang meninggal dengan perincian sebagai berikut: di Semarang Tengah 35 orang, di Semarang Kulon 24 orang, di Semarang Wetan 12, dan di Semarang Kidul 5 orang. Penyakit pes ini tidak hanya menjadi beban pemerintah *gemeente*, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Untuk mengatasi wabah pes di Semarang, pemerintah pusat memberikan bantuan untuk membentuk Dinas Pemberantasan Penyakit Pes dan Perbaikan Rumah. Berdasarkan pada pengawasan dinas tersebut, beberapa bangunan yang sudah terkena wabah pes yaitu: 214 gudang, 21 rumah batu, 73 rumah kayu, 47 rumah petak, 6 “pondok boro”, 15 kandang kuda dan garasi, 1 kendaraan yang disewakan, 16 tempat pembuatan mebel, 8 gudang yang dipakai untuk tempat tinggal, 6 rumah-toko, dan 7 tempat penjagaan. Bangunan-bangunan, yang dinilai sangat berbahaya, tidak diperbaharui, tetapi diruntuhkan (*Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Semarang Over 1917*: 277).

Pada tahun 1917, selain dilanda wabah pes, penduduk bumiputera Semarang juga terserang penyakit kolera, tifus, malaria, dan desentri. Korban meninggal pun terhitung cukup banyak. Ratusan penghuni pondok boro dan kuli-kuli *prauwenveer* (perusahaan prau dan tambang) dinyatakan terserang penyakit itu (*Verslag Van Den Toestand Der Gemeente Semarang Over 1917*: 215). Selain penyakit-penyakit ini, malaria dan influenza juga tercatat sebagai penyakit yang telah mengakibatkan banyak korban. Pada tahun 1918 rata-rata sekitar 40 sampai 60 orang bumiputera meninggal karena penyakit malaria dan influenza (*Gedenkboek Der Gemeente Semarang 1906-1931*: 192). Foto di bawah ini merupakan salah satu hasil bidikan kamera H.F. Tillema yang dimaksudkannya untuk menunjukkan suatu lingkungan kampung dalam kota Semarang yang menjadi surga bagi nyamuk anopheles (malaria).

Gambar 2. Salah satu lokasi di dalam Kota Semarang, surga bagi nyamuk anopheles

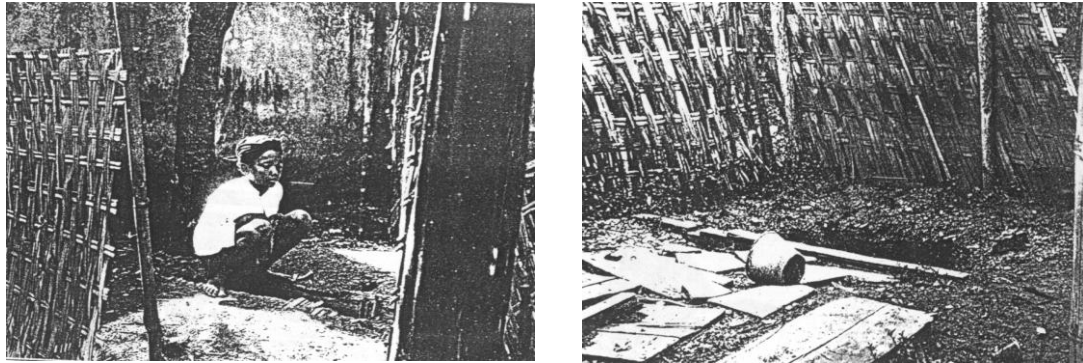


Sumber: H.F. Tillema, 1913, foto No. 32, sumber tidak menyebut nama kampung ini.

Banyaknya korban serangan penyakit di kalangan penduduk kampung di Semarang merupakan konsekuensi logis dari mahalannya ongkos pengobatan. Pada dasa warsa ke-2 abad ke-20, biaya pemeriksaan dokter berkisar antara f. 2,50,- - f. 5,- (Liem Thian Joe, 1933: 250), sedangkan upah buruh rata-rata per hari hanya sekitar f. 1,-. Selain faktor kemiskinan, kurangnya kesadaran akan lingkungan yang sehat dan bersih juga

menjadi penyebab timbulnya wabah penyakit. Gambaran tentang lingkungan kumuh yang menjadi sarang penyakit itu dapat disimak antara lain pada foto salah satu sudut perkampungan di kota Semarang yang dibuat oleh Tillema di bawah ini.

Gambar 3. Orang melakukan buang air besar di selokan sempit & dangkal, yang berdampingan dengan sumur.



Sumber: H.F. Tillema, 1913, foto No. 23 & 24.

Dengan nada pesimis, H.F. Tillema mempertanyakan kapankah kondisi seperti itu dapat diakhiri? Pertanyaan ini dikemukakannya ketika ia memotret suatu rumah “reyot” dengan W.C. yang tanpa *septic tank*, kotoran jatuh pada saluran kecil dan dangkal di bawahnya seperti tergambar dalam foto berikut ini.

Gambar 4. Rumah “reyot” di kampung di kota Semarang



Sumber: H.F. Tillema, 1913, foto No. 25.

Meskipun ketika itu di Semarang telah ada rumah-rumah sehat yang disewakan, kaum pekerja dengan pendapatan maksimal hanya 1 gulden per hari tidak mungkin dapat menjangkaunya, karena harga sewa termurah adalah 35 gulden. Di bawah ini ditampilkan foto salah satu rumah sewa yang dikelola oleh “Woningvereeniging Semarang.”

Gambar 5. Rumah dengan harga sewa f. 35,- per bulan.



Sumber: *Gedenkboek der Gemeente Semarang 1906-1931*, hlm. 166.

Kekumuhan rumah dan lingkungan di perkampungan dalam Kota Semarang pada saat itu dapat dipahami dengan mengingat kondisi kemiskinan finansial dan sistem budaya. Secara finansial, adalah sulit bagi golongan ekonomi lemah untuk membangun perumahan sehat. Kondisi ini juga ditunjang oleh sistem budaya atau sistem berpikir tentang “rumah” di kalangan golongan ekonomi lemah yang *notabene* kurang atau tidak berpendidikan itu.⁴

Gambaran tentang buruknya kondisi pemukiman dan kesehatan di perkampungan buruh di Semarang pada dekade ke-2 abad ke-20 di atas sangat berbeda dari kondisi pemukiman orang Eropa dan Cina yang kaya. Orang Eropa dan Cina kaya bermukim di tempat-tempat yang strategis, dengan bangunan yang kokoh, sehat, bersih, dan indah, seperti di sekitar Kota Lama, Candi Lama, Candi Baru, Bojong, Karrenweg (sekarang Jalan Dokter Cipto), Pendrian, dan lain-lain. Mewahnya kondisi pemukiman orang Eropa dapat disimak antara lain melalui foto yang dibuat oleh H.F. Tillema. Salah satu rumah yang difoto adalah rumah milik “tuan besar” Eropa di daerah Pindrian. Rumah itu sangat besar, bertingkat, dengan ventilasi yang memenuhi syarat kesehatan, halaman sangat luas dengan pepohonan yang rindang.

⁴ Sampai sekarang masih dapat disaksikan rumah-rumah di perkampungan Semarang yang tidak memiliki MCK. Masih banyak orang memanfaatkan sungai atau selokan sebagai tempat untuk buang air besar, bahkan juga untuk mencuci.



Sumber: H.F. Tillema, 1913, foto no. 50.

Para pengusaha Cina pun bermukim di tempat-tempat yang serupa dengan pemukiman orang Eropa. Seorang konglomerat Cina di Semarang yang sangat terkenal adalah Oei Tiong Ham (1866-1924), si raja gula (Liem Tjwan Ling dalam Yoshihara Kunio, 1991: 219). Ia bermukim di Gergaji, yang ketika itu juga menjadi tempat pemukiman orang-orang Eropa. Rumahnya itu tidak hanya megah, indah dan luas, tetapi juga dilengkapi dengan kebun binatang pribadi dengan berbagai macam binatang seperti beruang, ular, merak, burung kasuari, kera, menjangan dan lain-lain. Setiap minggu kebun binatang ini dibuka untuk umum dengan harga tiket masuk yang murah, sehingga dapat menjadi sarana rekreasi bagi rakyat Semarang. Di kalangan masyarakat Semarang tempat itu dikenal dengan sebutan “Kebon Rojo” (Amen Budiman dalam Suara Merdeka 23-7-1976). Oei Tiong Ham adalah seorang pengusaha yang terkenal di hampir seluruh dunia: Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Di Indonesia ia memiliki lima pabrik gula yaitu: Rejoagung, Krebet, Tanggulangin, Pakis, dan Ponèn. Induk perusahaannya bernama *Oei Tiong Ham Concern* dan cabang-cabangnya adalah *N.V. Handel Maatschappij Kian Gwan* serta *N.V. Algemeene Maatschappij tot Exploitasi der Oei Tiong Ham Suikerfabrieken* (Liem Tjwan Ling dalam Yoshihara Kunio, 1991: 227).

Demikianlah, pada awal abad ke-20 Kota Semarang telah menjadi *locus* kesenjangan kehidupan antara si kaya dan si miskin, antara kolonialis dan rakyat yang terjajah, antara kaum pemilik modal dan kaum buruh, antara orang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah, serta antara orang asing dan orang bumiputera. Pada suatu saat, semua faktor kesenjangan itu akan menjadi akses penting bagi perluasan Marxisme yang secara teoretis mengajarkan paham anti penindasan dan ketidakadilan.

4. Perluasan Marxisme

Pada dekade pertama abad ke-20, beberapa ideologi masuk ke Indonesia. Dari Eropa datang Marxisme dan Sosialisme, dan dari Timur Tengah masuk Islam Reformis dan Modernis. Pada saat yang sama, ide-ide demokrasi dan emansipasi Eropa menjadi akrab dengan orang Indonesia melalui buku-buku Barat, surat kabar dan majalah, serta melalui lembaga-lembaga pendidikan Barat (Kees Van Dijk dalam Robert Cribb, 1994: 261).

Marxisme merupakan ideologi yang berpotensi kuat dalam membangkitkan semangat perjuangan kelas buruh untuk melawan segala bentuk ketidakadilan yang bersumber dari kapitalisme. Dalam masyarakat industri modern, terdapat dua bentuk stratifikasi sosial, yaitu: kelas dan status. Pada umumnya istilah kelas digunakan

untuk menunjukkan pembagian masyarakat yang didasarkan pada posisi ekonomi, sedangkan istilah status dipakai untuk menunjukkan tingkat posisi seseorang atau kelompok yang ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu: nilai kehormatan diri, tingkat pendidikan, kemampuan membeli berbagai jenis barang konsumtif, latar belakang keluarga atau keturunan dan sebagainya. Semakin lama istilah status dinilai semakin kabur jika digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara industri dan stratifikasi sosial, karena semakin luasnya faktor-faktor yang berhubungan dengan istilah ini (S.R. Parker, dkk., 1992: 78-80).

Istilah kelas digunakan pertama kali oleh penguasa Romawi kuno untuk menggolongkan para pembayar pajak. Mereka membagi masyarakat Romawi atas dua golongan pembayar pajak yaitu *assidui* atau golongan kaya dan proletariat atau golongan miskin (AAGN Ari Dwipayana, 2001: 27-28). Pada abad ke-19, istilah kelas mulai dipakai dalam konteks analisis kesenjangan sosial yang berakar pada kondisi ekonomi. David Ricardo (1772-1823) adalah orang pertama yang mengartikan kelas dalam pengertian ekonomi. Ia menjelaskan bahwa pekerja atau buruh merupakan kelas sosial dalam sistem kapitalisme dengan hidup dan *interest* yang sangat berbeda dari hidup dan *interest* orang yang mempekerjakannya. Kemudian teori ekonomi tentang pembagian kelas ini dikembangkan oleh Karl Marx (1818-1883), walaupun konsep kelas yang diajukannya sering dinilai oleh ilmuwan sosial lainnya sebagai konsep yang tidak jelas. Ketidakjelasan konsepnya tentang kelas ini tampak dalam beberapa pernyataannya yang saling bertentangan sebagai berikut. Di satu sisi ia menyatakan bahwa kelas adalah suatu fenomena modern, khususnya dalam masyarakat kapitalis, dan istilah kelas harus digunakan dalam hubungan produksi. Akan tetapi, di sisi lain, ia juga mengatakan bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas (Bhikhu Parekh, 1982: 20-21).

Marx berpendapat bahwa kelas sosial adalah kelompok sosial dengan fungsi khusus dalam suatu proses produksi. Dalam masyarakat industri modern terdapat dua kelas yaitu kelas kapitalis dan pekerja atau buruh yang tidak memiliki apa pun kecuali tangan mereka untuk bekerja pada pemilik modal. Perbedaan fungsi di antara dua kelas itu menimbulkan konflik *interest*, dan perbedaan *interest* itu dapat mempengaruhi setiap kelas untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda (Peter Burke, 1992: 59). Marx juga berpendapat bahwa masing-masing kelas yang berbeda kepentingan itu merupakan sumber perubahan sosial. Menurutnya, seluruh sejarah adalah sejarah konflik antara kelas kapitalis yang mengeksploitasi dan kelas buruh yang dieksploitasi (Herbeth Kohl, 1992: 149).

Setiap kelas sosial membentuk kondisi ekonomi sendiri, memiliki kepentingan sendiri, dan mempunyai ide-ide sendiri yang berbeda dari kelas lainnya. Dalam hubungan produksi itu, kelas dominan atau kelas atas melaksanakan fungsi kapital, dan kelas bawah atau kelas yang ditundukkan melaksanakan fungsi tenaga kerja. Dalam setiap cara produksi terdapat sebuah kelas dominan yang menghasilkan ideologi dominan yang dipaksakan kepada kelas yang lain (AAGN Ari Dwipayana, 2001: 39-40). Kelas atas atau kelas dominan ini, oleh Marx, disebut juga *ruling class*, yaitu kelas yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi, kelas yang mengontrol negara yang mendukungnya untuk berkuasa, dan yang menentukan ide-ide pada masa tertentu. Kelas ini merupakan minoritas yang keputusan-keputusannya menentukan produksi ekonomi, distribusi kekayaan, kekuasaan politik, serta kreativitas seni dan intelektual (Suzanne Keller, 1963: 49).

Marxisme diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh orang-orang sosialis Belanda. Pada akhir abad ke-19 sudah ada orang-orang sosialis Eropa yang masuk menjadi anggota *Nederlandsch-Indische Onderwijzers Genootschap* (NIOG = Persatuan Guru Hindia Belanda) yang juga dipimpin oleh R.A. Schotman, seorang anggota *Sociaal-Democratische Arbeiders Partij* (SDAP). Salah seorang anggotanya adalah Westerveld, seorang sosialis Belanda yang menjadi anggota *gemeenteraad* (dewan kota) Semarang. Walaupun beranggotakan orang-orang sosialis Eropa, ide-ide sosialis belum mengemuka dalam organisasi ini (F. Tichelman, 1985: 3-4). NIOG berdiri di Batavia pada tanggal 26 April 1894, dan hanya beranggotakan guru-guru bangsa Eropa. Anggaran dasarnya disetujui oleh gubernur jenderal dengan *besluit* tertanggal 26 April 1895. NIOG kurang berorientasi pada ekonomi, tetapi lebih pada pengembangan pendidikan di Hindia Belanda (F. Tichelman, 1985: 196).

Perubahan di lingkungan kaum sosialis yang pasif itu terjadi setelah Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet tampil dalam panggung politik di Indonesia (ketika itu disebut Hindia Belanda) pada tahun 1914. Ia terkenal sebagai pemimpin serikat buruh dan seorang *opposant* kiri dalam *Sociaal Democratische Arbeiders Partij* (SDAP). Kemudian ia juga menjadi anggota *Sociaal Democratische Partij* (SDP), suatu organisasi yang beraliran marxisme.⁵ Setelah melalui pertentangan dengan para pemimpin sosialis yang moderat dalam SDAP dan *Nederlandsch Verbond van Vakvereeningen* (NVV = Persatuan Organisasi-organisasi Buruh Belanda), yang merupakan mayoritas dalam organisasi tersebut, Sneevliet dikeluarkan dari posisinya sebagai ketua *Nederlandsche Vereeniging van Spoor-en Tramwegpersoneel* (Persatuan Pegawai Kereta Api dan Tram Belanda). Faktor pemicu pertentangan itu adalah keterlibatan Sneevliet dalam memimpin pemogokan buruh galangan kapal di Amsterdam. Setelah kehilangan posisi di negeri Belanda, pada tahun 1913 Sneevliet datang di Hindia Belanda, selain untuk mencari pekerjaan, juga untuk melancarkan ajaran marxisme (F. Tichelman, 1985: 4).

Pertama-tama ia diterima sebagai redaktur *Soerabajaas Handelsblad*, suatu surat kabar di Surabaya yang menjadi media sindikat pabrik gula. Dalam bulan Mei 1913 ia pindah ke Semarang untuk menggantikan kedudukan rekannya, D.M.G. Koch, sebagai sekretaris *Semarang Handelsvereeniging*, dan juga menjadi redaktur *De Volharding*, surat kabar berbahasa Belanda yang menjadi media *Vereeniging van Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP). Pada bulan Mei tahun 1914 Sneevliet, bersama dengan rekan-rekannya J.A. Bransteder, H.W. Dekker, dan P. Bergsma, memprakarsai berdirinya *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV) di Surabaya. Berdasarkan pada anggaran dasarnya, organisasi ini bertujuan untuk mempropagandakan ide-ide sosial demokratis, berpartisipasi dalam politik praktis, mempelajari persoalan-persoalan ekonomi di Hindia Belanda dan memperkenalkan fraksi sosial demokrat di Belanda kepada rakyat Indonesia. Penduduk setempat dapat menjadi anggota. Jika di suatu tempat terdapat paling sedikit 6 orang yang ingin menjadi anggota, dapat dibentuk suatu cabang (Sneevliet archief, 1655/1).

Dasar-dasar pergerakan ISDV adalah Nasionalisme anti kolonial, dan Marxisme revolutioner (Henk Sneevliet, dkk., 1984: 14), yang digerakkan terutama pada masyarakat buruh. Menurut Sneevliet, hubungan yang lebih baik dan lebih adil antara pengusaha dan buruh hanya terjadi jika kaum buruh bersatu dalam organisasi yang kuat. Dalam hal ini, Sneevliet menyatakan bahwa ia akan memajukan perjuangan buruh secara terorganisasi untuk meningkatkan kehidupan mereka yang

⁵ Pada tahun 1918 SDP menjadi Partai Komunis dan pada tahun 1920 bergabung dengan Komunisme Internasional (Komintern). Periksa: F. Tichelman, 1985: 28.

berada di bawah standard penghidupan minimum. Sebagai penganut Marxisme, Sneevliet juga bergabung dalam *Comintern* (komunis internasional), sehingga ia pun menjadi seorang propagandis Komunis yang gigih untuk melaksanakan prinsip bahwa seorang Komunis harus bekerja di mana saja di kalangan rakyat jelata dan melakukan penetrasi dalam organisasi-organisasi lainnya (Ruth T. McVey, 1965: 77).⁶

Untuk melaksanakan prinsip itu, Sneevliet menyatakan bahwa ia harus berusaha untuk mengobarkan semangat perjuangan dalam setiap organisasi untuk kepentingan rakyat jelata. Meskipun ia tahu bahwa masyarakat di sini berbeda dari masyarakat di Barat, ia berpendapat bahwa sosialisme bukan merupakan dogma yang mati, melainkan merupakan keyakinan yang telah mengarahkan pikirannya, dan menunjukkan cara untuk meneruskan perjuangan anti kapitalisme di sini. Menurut Sneevliet, perluasan kapitalisme yang imperialistis ke negara-negara berkembang merupakan gejala ketakutan kelas penguasa di Eropa terhadap meningkatnya kekuatan kelas buruh, yang membahayakan kekuasaannya (Ruth T. McVey, 1965: 17-18). Berikut ini dipaparkan cara-cara dan proses perluasan Marxisme-Komunisme di Semarang pada dekade ke-2 abad ke-20.

4.1. Perluasan Marxisme Melalui Organisasi-organisasi

Organisasi yang menjadi sasaran ISDV pertama kali untuk menghubungkannya dengan rakyat Indonesia adalah *Insulinde*, suatu organisasi yang berpusat di Semarang. Semula *Insulinde*, yang didirikan pada tahun 1907, merupakan organisasi kaum Indo yang bersifat nonpolitis. Dalam perkembangan, organisasi ini meneruskan karakter pergerakan dan keanggotaan *Indische Partij* (1912-1913), yang tidak berumur panjang karena keradikalannya dalam menuntut persamaan hak antara golongan Eropa, golongan Indo, dan golongan Bumiputera. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mengangkat wacana “nasionalisme Hindia” yang dimaksudkan untuk menciptakan rasa kebangsaan Hindia, yang bukan berdasarkan pada kesukuan (Ruth T. McVey, 1965: 18).

Akan tetapi, pada akhirnya, ISDV memutuskan hubungan kerjasama dengan *Insulinde*, karena beberapa sebab, yaitu: pertama, pergerakan Indo bukan merupakan pintu masuk yang baik untuk mencapai massa rakyat; ke dua, kepentingan mereka adalah menggantikan elite penguasa Eropa dengan golongan Indo dan orang-orang Jawa yang berpendidikan, sehingga mereka hanya sedikit berguna dalam perjuangan kelas dan memperjuangkan kaum buruh serta petani Indonesia. Pemutusan hubungan politis dengan *Insulinde* itu ditetapkan dalam kongres ISDV pada bulan Juni 1916 (Ruth T. McVey, 1965: 18-19).

Setelah hubungannya dengan *Insulinde* berakhir, ISDV mulai mencari organisasi lain yang lebih muda dalam aktivitas politik. Perhatiannya ditujukan kepada Sarekat Islam, yang pada tahun 1916 telah memiliki ratusan ribu anggota. Beberapa anggota ISDV juga sudah menjadi pemimpin Sarekat Islam. Sneevliet dan rekannya, Adolf Baars,⁷ selalu berusaha untuk menghadiri rapat-rapat Sarekat Islam

⁶ Kongres Sosialis Internasional di Paris pada tahun 1900 mendorong pembentukan partai-partai sosialis di daerah-daerah koloni yang bertugas melakukan penetrasi ke dalam organisasi-organisasi yang lain. Periksa: F. Tichelman, 1985: 6

⁷ Adolf Baars adalah sahabat Sneevliet dan salah seorang pendiri Partai Komunis Hindia. Ia adalah sosialis Belanda yang bekerja sebagai guru di Sekolah Teknik di Surabaya. Seperti Sneevliet, Adolf Baars melancarkan agitasi di kalangan orang Indonesia untuk mendukung ISDV sayap kiri. Baars dapat berkomunikasi secara baik dengan orang Indonesia, karena ia dapat berbahasa Melayu dan Jawa. Pada tahun 1917 ia mendirikan suatu jurnal sosialis berbahasa Indonesia, *Soeara Merdeka*; pada tahun 1918 menerbitkan *Soeara Ra'jat*, yang kemudian menjadi organ Partai Komunis Hindia. Periksa Ruth T. McVey, 1965: 17.

dan berdiri sejajar dengan para pemimpin pergerakan, walaupun semula ISDV ragu-ragu apakah ia dapat melancarkan aksi dalam tubuh Sarekat Islam, karena organisasi tersebut tidak mempunyai tujuan politik yang jelas dan beorientasi keagamaan (Harry A. Poeze, 1976: 114). Dalam Kongres Nasional Sarekat Islam I pada tahun 1916 di Surabaya, Semaoen, sebagai anggota ISDV, berkesempatan menyampaikan pidato, dan secara umum Sarekat Islam mulai bersifat kritis terhadap pemerintah. Sebelumnya Sarekat Islam masih menunjukkan kesetiaan tanpa syarat kepada pemerintah kolonial, tetapi sejak saat itu organisasi ini mulai mengemukakan kritik terhadap kebijakan agraria (pertanahan) dan diputuskan untuk mendukung pergerakan buruh. Selain itu juga mengemukakan masalah titik temu antara prinsip-prinsip Islam dan sosialisme, suatu prinsip yang tidak hanya didukung oleh kaum pemuda radikal yang telah bergabung dengan ISDV, tetapi juga oleh pemimpin-pemimpin santri di perkotaan. Pada saat itu sosialisme dipahami secara dangkal, yaitu sebagai oposisi terhadap dominasi asing dan sebagai sarana untuk menuju Indonesia yang modern, sejahtera, dan merdeka (Ruth T. McVey, 1965: 19-20). Dalam kongres itu Hasan Ali Soerati, anggota Sarekat Islam Surabaya, menyatakan:

“Guru yang paling benar, junjungan kita Nabi Mohammad, adalah orang yang meniadakan perbedaan antara pria dan wanita, antara penguasa dan yang dikuasai, antara kedudukan dan kelas. Nabi kita melaksanakan ide sosialis tentang persamaan dalam semua bagian urusan pemerintahan; kebijakan ekonomi dan keagamaan serta pemerintahan diatur dengan ide ini” (Ruth T. McVey, 1965: 363-364).

Suatu hal yang perlu dicatat dalam kongres pertama Sarekat Islam mulai muncul kata “nasional”. Penggunaan kata nasional ini dapat dipahami sebagai salah satu gejala penguatan nasionalisme. Selanjutnya dalam kongres-kongres berikutnya semangat nasionalisme tampak semakin menguat. Dalam Kongres Sarekat Islam Nasional II di Batavia (21-27 Oktober 1917), Abdoel Moeis membahas nasionalisme yang diartikan sebagai perasaan cinta kepada bangsa dan tanah air, yang dirumuskannya dalam pernyataannya sebagai berikut.

“Kalau kita mengingat akan nasib buruknya tanah air dan bangsa kita, yang beratus tahun selalu berada dalam kungkungan orang lain saja, maka berdebarlah dada, timbullah suatu perasaan yang menggoyang segala urat saraf kita, perasaan kasihan kepada bangsa dan tanah air itu” (*Sinar Djawa*, 25-10-1917).

Menguatnya nasionalisme ini tampak berjalan sejajar dengan meluasnya ide-ide marxisme yang anti kapitalisme dan memperjuangkan persamaan. Dalam Kongres Centraal Sarekat Islam (CSI) II pada tahun 1917, Tjokroaminoto, pemimpin CSI, telah berbicara dengan kata-kata yang bernada sosialis seperti: menghancurkan kapitalisme yang jahat (*zondigkapitalisme*), sama rasa, menentang dominasi satu pihak terhadap pihak lain (*De Indische Gids*, 1918: 215).

4.2. Perluasan Marxisme melalui Media Cetak

Selain dengan cara penetrasi ke dalam organisasi-organisasi, ideologi Marxis juga disebarluaskan melalui surat kabar. Di Semarang terdapat beberapa media cetak untuk penyebaran Marxisme, yaitu terutama *De Volharding* - organ VSTP berbahasa Belanda (1908 - ?), *Si Tetap* - organ VSTP berbahasa Melayu (1919-1925), *Soeara Merdeka* - organ sosial demokrat (1917-?), *Het Vrije Woord* - organ ISDV (1915-1922), *De Indiër* - organ Insulinde (1917 - ?), *Sinar Djawa* - organ Sarekat Islam Semarang (1914-1918), *Sinar Hindia* - organ Sarekat Islam Semarang (1918-1924), *Api* - organ Partai Komunis Hindia (1924-1926) (*Katalogus Surat Kabar Koleksi Perpustakaan Museum Pusat 1810-1973*, 1973).

Melalui surat kabar, Sneevliet dapat menyebarkan Marxisme, namun melalui tulisannya dalam surat kabar pula Sneevliet harus menerima kenyataan bahwa ia harus menjalani hukuman pengasingan. Peristiwa pengasingannya itu terjadi setelah ia menulis dalam *De Indiër*, No. 63, 19-3-1917 dengan judul “Zegepraal” (Kemenangan). Dalam artikel ini, Sneevliet mengobarkan semangat rakyat yang miskin dan terjajah untuk melawan kapitalisme dan imperialisme dengan memberikan contoh kemenangan revolusi di Rusia. Berikut ini disajikan kutipan dari tulisannya itu:

Di sini hidup rakyat yang miskin, dan bodoh.

Di sini hidup rakyat, yang menghasilkan kekayaan, yang selama berabad-abad dikeruk untuk mengisi kantong-kantong para penguasa di Eropa Barat, terutama di negeri kecil, yang di sini menjalankan kekuasaan politik.

Di sini hidup rakyat yang menderita dan menanggung beban.

Organisasi politik dilarang Hak mengadakan rapat atau pertemuan diijinkan tetapi tidak dilaksanakan; kritik melalui pers diancam dengan hukuman yang berat oleh pengadilan yang harus memihak dan tidak adil, karena ia adalah pengadilan untuk pemerintah; upaya-upaya pergerakan ditindak dengan senjata pengasingan.

Di sini hidup jutaan rakyat yang menderita dan menanggung beban selama berabad-abad, dan sejak zaman Diponegoro, tidak memiliki pemimpin, yang dapat memimpin rakyat untuk melakukan tindakan.

Rakyat Jawa, revolusi Rusia memberikan contoh bagi tuan.

Rakyat Rusia juga menderita dan terjajah selama berabad-abad, miskin, dan sebagian besar juga buta huruf seperti tuan.

Rakyat dapat mencapai kemenangan karena perjuangan yang tak terpatahkan untuk melawan pemerintah yang kejam dan menyesatkan. Dan lawanlah terus semua upaya untuk menekan gerakan kemerdekaan. Itu tidak bisa lain, baik rakyat Jawa maupun rakyat Hindia dapat mencapai kemenangan seperti rakyat Rusia (*De Indiër*, No. 63, 19-3-1917; diterjemahkan oleh Dewi Yulianti).

Karena tulisannya itu, Sneevliet dikenai hukuman selama 9 bulan dan tidak lama kemudian ia diasingkan ke negeri Belanda (*Sinar Hindia*, 19-11-1918). Selanjutnya Adolf Baars, rekan sosialis Sneevliet, juga menggunakan surat kabar sebagai penyebaran ideologinya. Dalam *Het Vrije Woord*, No. 2, 20-10-1917, ia menulis suatu artikel dengan judul “*Het eerste resultaat*” (hasil yang pertama). Dalam artikel itu Baars menunjukkan antara lain pentingnya perjuangan buruh secara terorganisasi sebagai berikut.

Perkembangan masyarakat telah sampai pada terbentuknya kapitalisme di negara-negara maju. Kelebihan produksi industri berat di negara-negara itu mendorong terjadinya perluasan cara produksi kapitalistis di daerah-daerah lain, yang masih dalam tahap memproduksi untuk keperluan sendiri, dan yang masih melengkapi kebutuhannya dengan cara tukar-menukar barang. Perkembangan ini telah merubah sifat kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Cara sebelumnya, yang dipergunakan untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat pribumi demi keuntungan negeri Belanda (*cultuurstelsel*), diganti secara bertahap dengan usaha-usaha untuk menjadikan negeri ini sebagai sumber keuntungan bagi kelas kapitalis dari berbagai negara, terutama bagi kaum borjuis Belanda..... Kapitalisme telah menjadikan sebagian besar rakyat pribumi sebagai proletar, yang terpisah dari alat-alat produksi. Oleh karena itu mereka hanya dapat menjual tenaga kerja mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian kaum proletar terkonsentrasi di kota-kota, dan sebagian lainnya bekerja di perkebunan-perkebunan kapitalistis.....

Pembebasan Hindia (Indonesia) dan kesejahteraan seluruh rakyat hanya dapat diperoleh melalui cara-cara produksi kapitalistis; pembebasan nasional hanya mungkin dicapai atas dasar kebebasan ekonomi. Dengan menyerahkan perusahaan-perusahaan kapitalistis yang sekarang sedang berkuasa kepada rakyat, semua keuntungan perusahaan-perusahaan itu akan jatuh ke tangan rakyat sebagai pengganti sekelompok kecil orang asing. Keuntungan itu dapat dipergunakan untuk pengaturan-pengaturan sosial yang berguna bagi rakyat, dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

Proletariat dapat memenangkan perlawanan terhadap kaum kapitalis dan mengambilalih alat-alat produksi dari perseorangan menjadi milik bersama dengan cara merebut kekuasaan politik. Untuk tujuan ini, kaum buruh di seluruh dunia harus mengorganisasikan diri agar menyadari tugasnya dalam perjuangan kelas.

ISDV akan membantu rakyat Hindia, baik proletariat maupun petani, tanpa membedakan ras dan agama, untuk berorganisasi dalam partai politik yang mandiri, yang dapat melaksanakan perjuangan kelas di negerinya sendiri untuk melawan kelas kapitalis asing dan sekaligus melaksanakan perjuangan untuk pembebasan bangsanya” (*Het Vrije Woord*, No. 2, 20-10-1917; diterjemahkan oleh Dewi Yuliati).

Penyebaran Marxisme tidak saja melalui surat kabar, tetapi juga melalui literatur-literatur yang disebarluaskan kepada orang-orang bumiputera yang sudah dapat membaca bahasa Belanda. Sneevliet selalu membuka perpustakaan pribadinya bagi orang-orang bumiputera yang berminat membaca koleksi buku-buku sosialis.

4.3. Perluasan melalui Pendekatan dengan Pemimpin Bumiputera

Cara lain untuk penyebaran ide-ide sosialis yang cukup efektif adalah pendekatan kepada para pemimpin bumiputera, yang dapat menerjemahkan dan menyampaikan ide-ide itu secara intensif kepada rakyat jelata yang berpendidikan rendah dan buta huruf. Semaoen (1899-1971) adalah pemuda bumiputera pertama yang memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh sosialis Belanda, terutama Sneevliet. Ia lahir di Mojokerto, putera seorang pegawai kereta api. Semaoen bukan keturunan priyayi, tumbuh dalam era pergerakan, dan sempat menempuh pendidikan di *Inlandsche School* (sekolah rakyat bumiputera / sekolah dasar). Setelah lulus sekolah rakyat, ia

bekerja di *Staatsspoor* (SS) di Surabaya sebagai juru tulis. Ketika itu ia baru berusia 13 tahun. Pada tahun 1914 ia menjadi wakil ketua Sarekat Islam Surabaya. Pada tahun 1915, ia berjumpa dengan Sneevliet di Surabaya. Setelah berkenalan dengan Sneevliet, Semaoen terdorong untuk belajar menulis, membaca, dan berbicara bahasa Belanda. Terkesan akan ide-ide Sneevliet, yang memihak pada rakyat yang tertindas, Semaoen tertarik untuk menjadi anggota *Vereeniging van Spoor en Tramweg Personeel* (VSTP) dan ISDV. Tidak lama kemudian ia diangkat sebagai sekretaris ISDV Cabang Surabaya dan juga sebagai pemimpin VSTP Cabang Surabaya. Sneevliet dan Baars mempengaruhi Semaoen dengan ajaran-ajaran sosialis-revolutioner (Harry A. Poeze, 1976: 115). Pada bulan Juli 1916 ia meninggalkan pekerjaannya di *Statsspoor* untuk menjadi propagandis VSTP di Semarang dan menjadi editor *Si Tetap*, surat kabar VSTP berbahasa Melayu. Setelah itu, Semaoen juga menjadi propagandis dan komisaris Sarekat Islam Semarang. Dalam organisasi ini kepemimpinan Semaoen tampak menonjol, dan ini terbukti bahwa pada tanggal 6 Mei 1917 ia dipilih sebagai ketua (Dewi Yuliati, 2000: 7-8). Oleh pemerintah kolonial Belanda Semaoen dikenal sebagai tokoh pemuda yang radikal. Karakter Semaoen yang radikal ini dapat diketahui antara lain dari pernyataan Rinkes, seorang penasehat urusan bumiputera, tentang sifat harian *Sinar Hindia*. Menurut Rinkes, surat kabar itu dengan redaktur-redaktornya Semaoen, S. Partoatmodjo, dan Darsono, bersifat ekstrimis (*Inlandsche Pers Overzicht* No. 4/1920). Dalam kancah pergerakan buruh di Semarang, Semaoen adalah tokoh pemimpin yang sangat diwaspadai oleh pemerintah kolonial. Pada 8 Mei 1923 Semaoen ditangkap karena tuduhan *spreek-deliict* (pelanggaran terhadap peraturan berbicara di depan umum). Penangkapan Semaoen menjadi pemicu terjadinya pemogokan buruh kereta api pada hari itu juga. Karena Semaoen dianggap terlalu berbahaya bagi stabilitas politik dan ekonomi negara kolonial, ia diasingkan ke negeri Belanda dengan dasar keputusan gubernur jenderal tanggal 15 Agustus 1923, No. 1x.

Kaum sosialis Eropa yang tergabung dalam ISDV berupaya secara gigih untuk menarik simpati rakyat bumiputera. Pada tahun 1915 ISDV memperoleh momentum pertama untuk hal ini. Ketika itu, seorang jurnalis bumiputera terkenal, Marco Kartodikromo, harus menjalani hukuman kurungan selama 7 bulan di penjara “Mlaten” di Semarang, karena tuduhan delik pers sehubungan dengan beberapa artikelnya dalam *Doenia Bergerak*.⁸ Dengan memanfaatkan peristiwa ini, ISDV bersama dengan organisasi yang lain membentuk *Comite van Actie voor Drukpersvrijheid* (Komite Penuntut Kebebasan Pers) guna mendesak gubernur jenderal Idenburg untuk menghapuskan sisa waktu hukuman Marco yang masih empat bulan lagi. Komite itu dibentuk di rumah Sneevliet di Gergaji pada tanggal 10 Januari 1915. Wakil-wakil organisasi yang hadir dalam rapat pembentukan komite tersebut adalah: D.J.A. Westerveld (ISDV), H.J.F.M. Sneevliet (ISDV), G.L. Tope (Insulinde), Zimmerman V. Woesih (VSTP), Mohammad Joesoef (VSTP), Brandsteder (Marinebond), Tjipto Mangoenkoesoemo (IJB), Darnakoesoema (IJB), K.T. Kwee (dari harian *Djawa Tengah*) (Liem Thian Joe, 1933: 232).

Permintaan penghapusan hukuman Marco itu dikabulkan, dan Marco pun dibebaskan. Setelah bebas dari hukuman, ia dikirim ke negeri Belanda oleh pemimpin harian *Pantjaran Warta*, Goenawan, untuk menjadi koresponden. Di negeri Belanda ia tinggal selama lima bulan, dan selama di sana ia sangat terkesan dan terpengaruh oleh suasana kebebasan mengeluarkan pendapat. Di Belanda ia dapat pula

⁸ Selama Marco dipenjara, istrinya tinggal di rumah Mohammad Joesoef, ketua Sarekat Islam Semarang untuk periode 1915-1917. Hal ini menunjukkan bahwa ketika itu telah terbentuk solidaritas perjuangan yang *solid*. Periksa: *Sinar Djawa*, 29 Pebruari 1916.

menerbitkan *Boekoe Sebaran Jang Pertama*, yang dicetak oleh percetakan *Luctor Et Emerco* di 's-Gravenhage. Buku ini berisi gagasan Marco untuk meminta persamaan dan keadilan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam tulisannya itu, Marco mengatakan antara lain: "Regeering kami minta persamaan. Pemerintah, Awas! Kita anak Hindia soedah berapi. Gouvernement, berilah permintaan anak Hindia, soepaja bahaja berontakan tidak mendjangkit di tanah Hindia, toempah darah kita Wong Jowo" (Vb. 8-11-1917 No. 36). Dari tulisannya itu, dapat dipahami bahwa Marco adalah anak bangsa yang telah berjasa dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi tanah airnya. Marxisme menjadi tuntunannya untuk mencapai cita-citanya yaitu melenyapkan kolonialisme dan kapitalisme asing. Akhirnya ia terlibat dalam pemberontakan komunis tahun 1926. Marco adalah salah satu korban pergerakan yang diasingkan ke Digul dan meninggal di pengasingan itu karena penyakit malaria..

Momentum kedua yang digunakan oleh ISDV untuk menarik simpati rakyat bumiputera adalah saat dilancarkannya kampanye *Indië Werbaar* (pertahanan Hindia), suatu kampanye untuk membangun milisi bumiputera di bawah komando Belanda. Pelaksanaan kampanye *Indië Weerbaar* bersumber dari ketakutan pemerintah kolonial Belanda terhadap perluasan kekuasaan Jepang dan Australia (Inggris) ke kepulauan Indonesia selama Perang Dunia I. Kampanye ini sangat berpengaruh terhadap orang-orang Indonesia yang telah sadar politik. Sebagian dari mereka memanfaatkan kampanye itu sebagai sarana untuk menuntut pemerintah kolonial Belanda agar memperluas hak-hak politik rakyat. Akan tetapi di sisi lain, ISDV melalui *Het Vrije Woord* menentang pelaksanaan *Indië Weerbaar*, karena hal itu hanya akan mendukung tujuan militeris dan imperialis (Ruth T. McVey, 1965: 16-17).

Tokoh Semarang yang lain adalah Darsono. Menurut pengakuannya, ia tertarik untuk terjun dalam dunia politik, karena terkesan akan sikap Sneevliet yang memihak rakyat. Atas ajakan Semaoen, Darsono ikut bergiat dalam Sarekat Islam Semarang. Kongres Sarekat Islam pada tahun 1918 memutuskan untuk menempatkan Darsono sebagai propagandis Centraal Sarekat Islam dan Semaoen sebagai Komisaris Wilayah Jawa Tengah. Sejak tanggal 1 Pebruari 1918 Darsono ditempatkan sebagai redaksi *Sinar Djawa*. Kegiatan politik dan jurnalistiknya di Semarang berakhir, setelah ia ditangkap pada tanggal 11 Agustus 1924, karena ia dituduh sebagai provokator dalam berbagai pemogokan buruh di Semarang, yaitu: pemogokan buruh rumah sakit (*Centraal Burgerlijke Ziekenhuisinrichting*), pemogokan buruh perusahaan mesin jahit Singer (*Singer Sewing Company*), dan buruh perusahaan perahu tambang (*Semarangsche Prauwenveer*) (R.C. Kwantes, 1975: 368). Dalam perkara ini, Darsono dikenai hukuman pengasingan ke Merauke, namun atas permintaannya sendiri, dan atas dasar besluit gubernur jenderal tertanggal 15 Januari 1926 No. 1x, ia diasingkan ke Rusia dengan biaya sendiri (R. C. Kwantes, 1975: 381).

5. Simpulan

Kota Semarang yang telah mengalami industrialisasi sejak pertengahan abad ke-19 menjadi "lahan subur" bagi terbentuknya masyarakat buruh dan perluasan Marxime. Di satu sisi, kapitalisme, imperialisme, serta kesenjangan sosial yang demikian lebar menjadi faktor-faktor yang telah menempatkan kaum buruh bumiputera pada posisi dan eksistensi kehidupan dan penghidupan marginal dan minimal. Di sisi lain, marxisme yang menyuarakan "anti kapitalisme" serta "anti imperialisme" mendapat akses mulus untuk merekrut simpati masyarakat buruh di Kota Semarang.

Slogan anti kapitalisme dan imperialisme itu dimaksudkan untuk membangun kesadaran kelas buruh di daerah jajahan guna meraih dukungan rakyat demi penyebarluasan ideologi Marxis yang anti kapitalisme. Karena ideologi ini tampak memihak pada rakyat yang dijajah dan dipinggirkan, masyarakat buruh dan beberapa pemimpin pergerakan buruh di Semarang meyakini sebagai ideologi yang baik untuk melawan imperialis-kapitalis Eropa atau kapitalisme asing.

Dari kajian ini dapat dipetik pelajaran bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan, jika Marxisme-Komunisme harus diwaspadai sebagai bahaya laten, karena sesungguhnya karakteristik Marxisme-Komunisme memang melekat pada setiap pekerja atau buruh yang sadar untuk melawan segala bentuk ketidakadilan atau perlakuan eksploitatif. Kesadaran kaum pekerja atau buruh terhadap perlakuan eksploitatif dapat menjadi *frame* yang memberikan kemungkinan bagi aktor-aktor tertentu untuk memobilisasi perlawanan (Doug Mc Adam, Sidney Tarrow, Charles Tilly, dalam Mustain, 2004: 22). Mobilisasi perlawanan dapat berupa *violence* (kekerasan), *public gatherings* (rapat umum), *strikes* (pemogokan), *food riots* (kerusuhan karena persoalan makanan), dan demonstrasi (Lynt Hunt dalam Theda Skocpol, 1984: 245), yang sangat mungkin dapat menjadi ancaman bagi stabilitas sosial-politik dan sosial-ekonomi suatu Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Poeze, Harry. 1976. *Tan Malaka, Levensloop van 1897 tot 1945*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Ari Dwipayana, AAGN. 2001. *Kelas dan Kasta Pergulatan Kelas Menengah di Bali*. Yogyakarta: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Baars, A. "Het eerste resultaat. Ontwerp Beginselverklaring", dalam *Het Vrije Woord*, No. 2, 20-10-1917.
- Brommer, B. ,dkk. 1995. *Semarang Beeld van Een Stad. Purmerend* .Nederland: Asia Maior.
- Budiman, Amen. "Oei Tiong Ham" , dalam *Suara Merdeka*, 23-7-1976.
- Burke, Peter. 1992. *History and Social Theory* Cambridge: Polity Press.
- Cobban, L. 1988. "Kampungs and Conflict in Colonial Semarang", dalam *Journal of Southeast Asian Studies* Vol. XIX No. 2, 1988.
- De Winter , Tinus, dkk. (red.). 1984. *Internationaal Socialisme*. Rotterdam: Van Lambaart/Gramo.
- De Indiër*, No. 63, 19-3-1917.
- Gedenboek der Gemeente Semarang 1906-193* . Semarang: N.V. Dagblad De Locomotief.
- Ingleson, John. 1986. *In Search of Justice Workers and Unions in Colonial Java, 1908-1926*. Singapore, Oxford, New York: Oxford University Press.
- Inlandsche Pers Overzicht* No. 4/1920.

- Katalogus Surat Kabar Koleksi Perpustakaan Museum Pusat 1810-1973*, Jakarta, 1973.
- Keller, Suzanne. 1963. *Beyond The Rulling Class Strategic Elites in Modern Society* London: Random House, Inc., 1963.
- Koloniaal Verslag van 1915*.
- Kwantes, R.C. (ed.), *De Ontwikkeling van De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië*, bronnen publikatie, eerste stuk: 1917-medio 1923. Groningen: Tjeenk Willink and Wolters Noordhoff.
- Liem Thian Joe, 1933. *Riwayat Semarang 1416-1931 (Dari Djamannja Sam Poo Sampe Terhappoesnja Kong Koan)* . Semarang,
- Liem Tjwan Ling, 1991. "Raja Gula: Oei Tiong Ham, dalam Yoshihara Kunio (penyunting), *Konglomerat Oei Tiong Ham Kerajaan Bisnis Pertama di Asia Tenggara* . Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- McVey, Ruth T. 1965 *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Magnis-Suseno, Frans. 2000. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mustain, "Gerakan Petani di Pedesaan Jawa Timur Pada Era Reformasi Studi Kasus Gerakan Reclaiming Oleh Petani Atas Tanah yang dikuasai PTPN XII Kalibakar, Malang Selatan", disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Erlangga, 2004.
- Parekh, Bhikhu. 1982. *Marx's Theory of Ideology*. London: Croom Helm Ltd.
- Parker, S.R., dkk., 1992. *Sosiologi Industri*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- R. Popper, Karl. 2002. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya*, terjemahan dari "The Open Society and Its Enemies." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij Verslag over Het Jaar 1919*.
- Sneevliet archief, 1655/1.
- Sinar Djawa*, 25 – 10 – 1917.
- Sinar Hindia*, 19-11-1918 No. 232.
- Suryo, Djoko, 1989. *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900* .Yogyakarta: PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Skocpol, Theda, *Vision and Method Historical Sociology*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Tichelman, F. 1985. *Socialisme in Indonesië De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging 1897-1917*. Dordrecht-Holland/Cinnaminson-U.S.A.: Foris Publications.

- Tillema, H.F. 1913. *Van Wonen en Bewonen, Van Bouwen, Huis en Erf*. Tjandi – Semarang. 1913.
- Yuliati, Dewi, 1997. “Industrialisasi di Semarang (1906-1930) dalam *Lembaran Sastra* No. 23 Tahun 1997. Semarang: Fakultas Sastra Univ. Diponegoro.
- _____, 2000. *Semaoen, Pers Bumiputera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang*. Semarang: Bendera.
- _____, 2009. *Menuju Kota Industri – Semarang Pada Era Kolonial*, Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Van Dijk, Kees. 1994. “The Threefold Suppression of the Javanese The Fight against Capitalism”, The Colonial State, and The Traditional Rulers”, dalam Robert Cribb. *The Late Colonial State in Indonesia Political and Economic Foundations of The Netherlands Indies 1880-1942*. Leiden: KITL Press.
- Verslag Van De Toestand Der Gemeente Semarang Over 1917.*
- Verslag Van De Toestand Der Gemeente Semarang Over 1915.*
- Wertheim, W.F., 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosia*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- _____, (ed.), 1958. *The Indonesian Town Studies in Urban Sociology*. The Hague: W. Van Hoeve Ltd..
- Westerveld, D.J.A. 1914. “Woning Toestanden onder de Javaansche Bevolking te Semarang”, dalam *Gemeentebld Semarang 1914*.

